

**ANALISIS IMPLEMENTASI
ASEAN REGIONAL ACTION PLAN FOR COMBATING MARINE DEBRIS
PADA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN TAHUN 2021–2025**

Andini Aulia Fitriyanti¹, Maulana Rifai²
Universitas Singaperbangsa Karawang^{1,2}
2210631260025@student.unsika.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ASEAN dalam penanganan *marine debris* melalui implementasi ASEAN Regional Action Plan pada negara-negara anggota ASEAN periode 2021–2025. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari dokumen resmi ASEAN, laporan organisasi internasional, artikel ilmiah, serta berbagai publikasi yang relevan dengan isu *marine debris*. Analisis dilakukan menggunakan teori organisasi internasional Clive Archer yang memandang organisasi internasional sebagai arena dan instrumen kerja sama antarnegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN berperan sebagai arena yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama regional dalam penanganan sampah plastik laut serta sebagai instrumen melalui ASEAN Regional Action Plan yang menjadi pedoman bagi negara-negara anggota. Namun, penelitian menemukan bahwa sebagian besar negara yang menjadi fokus penelitian, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam, telah memiliki kebijakan nasional terkait penanganan *marine debris* sebelum diterbitkannya ASEAN Regional Action Plan tahun 2021. Oleh karena itu, peran utama ASEAN lebih terlihat dalam upaya mengoordinasikan, menyelaraskan, dan memperkuat kebijakan nasional yang telah ada dibandingkan sebagai faktor utama yang mendorong lahirnya kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ASEAN memiliki kontribusi penting dalam penguatan kerja sama regional, meskipun efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh kapasitas dan komitmen masing-masing negara anggota.

Kata Kunci: ASEAN, ASEAN *Regional Action Plan*, Clive Archer, Marine Debris, Sampah Plastik Laut.

ABSTRACT

This study aims to analyze ASEAN's role in addressing marine debris through the implementation of the ASEAN Regional Action Plan among ASEAN member states during the 2021–2025 period. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through library research. Data were collected from official ASEAN documents, international organization reports, scholarly articles, and other relevant publications concerning marine debris issues. The analysis utilizes Clive Archer's theory of international organizations, which views international organizations as arenas and instruments of interstate cooperation. The findings reveal that ASEAN functions as an arena by facilitating regional coordination and cooperation in addressing marine plastic pollution and as an instrument through the ASEAN Regional Action Plan, which serves as a regional

policy framework for member states. However, the study finds that most of the selected member states, namely Indonesia, Thailand, and Vietnam, had already established national policies related to marine debris before the adoption of the ASEAN Regional Action Plan in 2021. Therefore, ASEAN's primary role lies in coordinating, harmonizing, and strengthening existing national policies rather than initiating them. This study concludes that ASEAN plays a significant role in enhancing regional cooperation on marine debris management, although the effectiveness of implementation remains dependent on the capacity and commitment of individual member states.

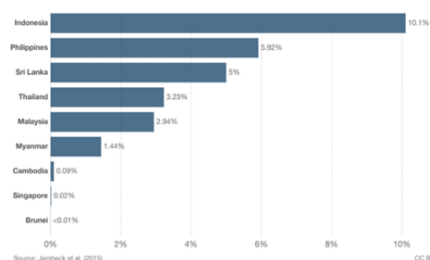
Keywords: ASEAN, ASEAN Regional Action Plan, Clive Archer, Marine Debris, Marine Plastic Pollution.

PENDAHULUAN

Sampah Laut atau marine debris sudah menjadi perhatian sejak beberapa waktu terakhir, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Sampah Laut atau marine debris adalah material padat yang sulit terurai, limbah industri, atau hasil olahan yang dibuang atau dibiarkan di lingkungan laut dan pesisir. Sampah ini dapat berasal dari aktivitas manusia di darat maupun di laut, seperti limbah rumah tangga, industri, dan aktivitas perkapalan. Sekitar 80% sampah laut diperkirakan berasal dari daratan yang disebabkan oleh kurangnya layanan pengolahan limbah padat dan sampah yang terbawa aliran sungai ataupun kanal. (MENLHK, 2017)

Salah satu sampah terbanyak yang termasuk dalam sampah laut adalah sampah plastik. Setidaknya 60-80% dari sampah yang dihasilkan dunia adalah sampah plastik, dan 10% dari sampah tersebut dibuang ke laut lepas, maka dari itu sampah plastik menjadi perhatian utama sebab sifatnya yang sulit terurai dan dampaknya terhadap ekosistem laut karena plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terdegradasi. (Annisa, D. 2019).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli kelautan asal Amerika Serikat, Jenna Jambeck pada 2015, menunjukan 6 dari 11 negara Asia Tenggara termasuk dalam 20 negara dengan pengelolaan sampah plastik terburuk. Indonesia menempati peringkat kedua, diikuti oleh Filipina di posisi ketiga, Vietnam keempat, Thailand keenam, Malaysia kedelapan, dan Myanmar di urutan ke-17. Jumlah polusi plastik yang mencemari laut di negara-negara tersebut diperkirakan mencapai 1,4 hingga 3,54 metrik ton pertahun, dari total global yang berkisar antara 8 hingga 12 juta metrik ton. (Jambeck, J. et al, 2015)



(sumber: Jambeck, J. et al, 2015)

Dalam *Action Plan Summary ASEAN Regional Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States 2021*, menunjukan bahwa 234 Juta Ton Sampah dihasilkan hanya dari enam negara ASEAN Member

States (AMS) pada tahun 2016, diperkirakan 31,7 Juta ton dari sampah tersebut merupakan sampah plastik. Dimana 53% sampah yang dihasilkan di ASEAN tidak diangkut dan kurang dari seperempat dari total sampah yang diangkut di ASEAN di daur ulang atau hanya 23%, 34% dibuang ilegal dan 43% sisanya dibuang secara aman. (ASEAN Action Plan Summary, 2021)

Ditinjau dari dua laporan tersebut, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah plastik. Mereka tidak hanya harus menangani limbah yang dihasilkan di dalam negeri, tetapi juga sampah yang terbawa dari sumber eksternal, mengingat negara-negara ASEAN terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Polusi lintas batas ini memperumit upaya pengelolaan sampah, sehingga menuntut kerja sama regional dan pendekatan terpadu dalam mengatasi pencemaran laut.

ASEAN telah menunjukkan kepeduliannya terhadap perlindungan lingkungan sejak dideklarasikannya *Manila Declaration of the ASEAN Environment* pada tahun 1981 (Fadilah, E. M., Dermawan, W., & Sudirman, A., 2022). Pada tahun 2019, ASEAN mengadopsi kerangka kerja awal “*ASEAN Framework of Action on Marine Debris*” yang bertujuan memberikan panduan kebijakan umum untuk mengatasi permasalahan sampah laut di ASEAN. Kerangka kerja ini mencakup kebijakan dan koordinasi; penelitian dan inovasi; peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat; serta kerja sama dengan sektor swasta (Ar’bah, F. F., 2023). Selanjutnya, Pada 2021 ASEAN menindak lanjut kerangka kerja sebelumnya dengan program

“*ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021-2025)*” dimana aksi ini lebih detail dan berorientasi pada implementasi dengan tiga jalur utama yaitu, mengurangi kebocoran sampah plastik ke laut, meningkatkan tata kelola regional dan koordinasi kebijakan, dan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat. (ASEAN, 2021)

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam implementasi kebijakan dan koordinasi antarnegara anggota masih menjadi hambatan signifikan. Kurangnya kemauan politik dan desain kelembagaan yang memadai dalam kerja sama lingkungan di kawasan ini menghambat efektivitas penanganan sampah laut. (Kompasiana, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis implementasi *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021–2025)* pada negara-negara anggota ASEAN serta mengkaji peran ASEAN dalam mendorong kerja sama regional dalam penanganan sampah plastik laut.

Subjek penelitian ini adalah ASEAN sebagai organisasi regional yang berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021–2025)*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASEAN sebagai Arena Kerja Sama Regional dalam Penanganan *Marine Debris*

Permasalahan *marine debris* merupakan salah satu isu lingkungan transnasional yang menjadi perhatian negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Karakteristik sampah laut yang dapat berpindah melintasi batas negara melalui arus laut menjadikan permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan domestik masing-masing negara. Tingginya jumlah sampah plastik yang masuk ke perairan Kawasan ASEAN juga menunjukkan bahwa pencemaran laut telah berkembang menjadi tantangan bersama yang membutuhkan respons kolektif. Kondisi tersebut mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerja sama regional dalam Upaya mengurangi pencemaran sampah plastik laut.

Sebagai organisasi regional, ASEAN mulai menunjukkan komitmennya terhadap penanganan *marine debris* melalui berbagai forum dan kesepakatan bersama. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pengesahan *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region* pada tahun 2019 yang menegaskan komitmen negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama dalam mengurangi pencemaran sampah laut. Komitmen tersebut kemudian

diperkuat melalui pembentukan *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* yang berfungsi sebagai pedoman umum dalam pengembangan kebijakan dan program penanganan sampah laut di kawasan ASEAN.

Dalam perspektif *Clive Archer*, organisasi internasional memiliki fungsi sebagai *arena* yang menyediakan ruang bagi negara-negara anggota untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan perumusan kebijakan bersama. Fungsi tersebut terlihat dalam berbagai inisiatif ASEAN terkait penanganan *marine debris*. Melalui berbagai forum regional yang dibentuk, ASEAN menjadi wadah bagi negara-negara anggota untuk bertukar informasi, berbagi pengalaman, serta mengidentifikasi tantangan bersama dalam pengelolaan sampah plastik laut.

Keberadaan ASEAN sebagai arena kerja sama regional menjadi penting mengingat setiap negara anggota memiliki tingkat kapasitas, prioritas pembangunan, serta sistem pengelolaan limbah yang berbeda. Melalui mekanisme kerja sama yang tersedia, negara-negara anggota dapat menyelaraskan kepentingan nasional dengan tujuan kolektif kawasan. Dengan demikian, peran ASEAN tidak hanya terbatas sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai sarana yang memungkinkan terbentuknya koordinasi regional dalam menghadapi permasalahan *marine debris* yang bersifat lintas batas.

ASEAN Regional Action Plan sebagai Instrumen Kebijakan Regional dalam Penanganan Marine Debris

Sebagai tindak lanjut dari *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region* dan *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*, ASEAN meluncurkan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021–2025)* pada tahun 2021. Rencana aksi ini disusun sebagai pedoman regional yang bertujuan memperkuat koordinasi antarnegara anggota dalam mengurangi pencemaran sampah plastik laut serta mendukung tercapainya pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Berbeda dengan kerangka kerja sebelumnya yang masih bersifat umum, *ASEAN Regional Action Plan (RAP)* 2021–2025 dirancang dengan pendekatan yang lebih operasional melalui berbagai program dan target yang dapat diimplementasikan oleh negara-negara anggota. RAP berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu mengurangi kebocoran sampah plastik ke lingkungan laut, meningkatkan koordinasi kebijakan dan tata kelola regional, serta memperkuat kapasitas dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan *marine debris*.

Dalam perspektif Clive Archer, organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai arena pertemuan antarnegara, tetapi juga sebagai instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Instrumen tersebut dapat berupa kebijakan, program kerja, maupun mekanisme koordinasi yang dirancang untuk mengarahkan tindakan negara anggota menuju tujuan yang telah

disepakati. Dalam konteks ini, ASEAN Regional Action Plan dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan regional yang digunakan ASEAN untuk menyelaraskan berbagai upaya nasional dalam penanganan sampah plastik laut.

Melalui RAP, ASEAN berupaya menciptakan kerangka kerja bersama yang dapat menjadi acuan bagi negara-negara anggota dalam merumuskan maupun memperkuat kebijakan nasional terkait pengelolaan sampah plastik. Kehadiran RAP juga menunjukkan adanya upaya ASEAN untuk mendorong harmonisasi kebijakan di tengah perbedaan kapasitas, tingkat pembangunan, serta kondisi geografis masing-masing negara anggota. Dengan adanya pedoman regional tersebut, negara-negara ASEAN memiliki referensi yang sama dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas penanganan *marine debris*.

Selain itu, RAP juga berperan dalam memperkuat kerja sama antara ASEAN dengan berbagai mitra eksternal, seperti *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *World Bank*, *ASEAN+3*, serta berbagai organisasi internasional lainnya yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kerja sama tersebut menjadi penting karena permasalahan sampah plastik laut tidak hanya membutuhkan komitmen politik, tetapi juga dukungan teknologi, pendanaan, dan penguatan kapasitas institusional yang memadai.

Meskipun demikian, RAP tidak memiliki sifat yang mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi negara-negara anggota ASEAN. Implementasi berbagai program dan target yang terdapat dalam RAP tetap bergantung pada kebijakan domestik, kemampuan institusional, serta

tingkat komitmen masing-masing negara anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi utama RAP lebih terletak pada kemampuannya sebagai instrumen koordinasi regional dibandingkan sebagai mekanisme yang dapat memaksa negara anggota untuk mematuhi kebijakan tertentu.

Dengan demikian, ASEAN *Regional Action Plan 2021–2025* dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan regional yang berfungsi untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan agenda kawasan, serta mendukung pengembangan kebijakan nasional dalam penanganan *marine debris*. Keberadaan RAP menjadi salah satu bentuk upaya ASEAN dalam membangun respons kolektif terhadap permasalahan sampah plastik laut yang semakin kompleks di kawasan Asia Tenggara.

Implementasi ASEAN Regional Action Plan pada Negara-negara Anggota ASEAN Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang menghadapi permasalahan serius terkait pencemaran sampah plastik laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang serta aktivitas ekonomi pesisir yang tinggi sehingga rentan terhadap akumulasi sampah laut. Berdasarkan penelitian Jambeck et al. (2015), Indonesia bahkan pernah menempati posisi kedua sebagai penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil berbagai langkah strategis dalam menangani permasalahan *marine debris*.

Sebelum diterbitkannya ASEAN *Regional Action Plan for Combating Marine Debris 2021–2025*, Indonesia telah lebih dahulu mengadopsi *Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) 2018–2025* yang menargetkan pengurangan sampah plastik laut sebesar 70 persen pada tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan berbagai kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di sejumlah daerah, seperti Jakarta dan Bali. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa komitmen Indonesia dalam menangani permasalahan sampah laut telah terbentuk sebelum ASEAN mengeluarkan kerangka aksi regionalnya.

Meskipun demikian, keberadaan ASEAN *Regional Action Plan* tetap memiliki relevansi bagi Indonesia. RAP menyediakan kerangka kerja regional yang memungkinkan Indonesia untuk mengintegrasikan kebijakan nasionalnya ke dalam agenda kerja sama kawasan yang lebih luas. Melalui berbagai forum ASEAN, Indonesia dapat bertukar informasi, berbagi praktik terbaik (*best practices*), serta memperoleh dukungan teknis dalam pengembangan kebijakan pengelolaan sampah plastik yang lebih efektif.

Dalam perspektif Clive Archer, kondisi ini menunjukkan bahwa ASEAN tidak berperan sebagai aktor utama yang memunculkan kebijakan nasional Indonesia terkait penanganan *marine debris*. Sebaliknya, ASEAN berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat dan mengoordinasikan berbagai upaya yang telah dilakukan pada tingkat nasional. Dengan kata lain,

hubungan antara kebijakan Indonesia dan ASEAN RAP lebih bersifat komplementer dibandingkan hubungan sebab-akibat.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas ASEAN dalam penanganan *marine debris* tidak dapat diukur hanya berdasarkan munculnya kebijakan nasional baru di negara anggota. Sebaliknya, kontribusi ASEAN lebih terlihat pada kemampuannya dalam menciptakan koordinasi regional dan menyelaraskan berbagai inisiatif nasional yang telah ada sebelumnya ke dalam kerangka kerja kawasan yang lebih terintegrasi.

Thailand

Thailand merupakan salah satu negara ASEAN yang secara aktif mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah plastik sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebelum diterbitkannya ASEAN RAP 2021–2025, pemerintah Thailand telah mengesahkan *Thailand Plastics Circular Economy Roadmap 2018–2030* yang berfokus pada pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, peningkatan tingkat daur ulang, serta pengembangan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah plastik.

Keberadaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa upaya Thailand dalam menangani pencemaran plastik laut telah berlangsung sebelum ASEAN mengadopsi RAP sebagai kerangka kerja regional. Dengan demikian, sebagaimana yang terjadi di Indonesia, ASEAN RAP tidak dapat dipandang sebagai faktor utama yang mendorong lahirnya kebijakan nasional Thailand. Namun demikian, RAP memberikan ruang koordinasi yang memungkinkan Thailand untuk

menyesuaikan berbagai program nasionalnya dengan agenda lingkungan regional ASEAN.

Selain itu, partisipasi Thailand dalam berbagai program kerja ASEAN terkait *marine debris* menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat kerja sama kawasan dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang bersifat lintas batas. Melalui koordinasi tersebut, Thailand tidak hanya memperoleh manfaat berupa pertukaran pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan standar dan praktik pengelolaan sampah laut di tingkat regional.

Dalam kerangka pemikiran Clive Archer, peran ASEAN dalam kasus Thailand dapat dipahami sebagai instrumen yang mendukung harmonisasi kebijakan antarnegara anggota. ASEAN menyediakan pedoman dan arah kerja sama bersama, sementara implementasi konkret tetap ditentukan oleh kapasitas serta prioritas nasional masing-masing negara.

Vietnam

Vietnam merupakan salah satu negara ASEAN yang menghadapi tantangan serius terkait pencemaran sampah plastik laut akibat tingginya aktivitas ekonomi pesisir, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya konsumsi plastik. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Vietnam meluncurkan *National Action Plan for Marine Plastic Waste Management 2020–2030* yang bertujuan untuk mengurangi secara signifikan jumlah sampah plastik yang masuk ke lingkungan laut. Kebijakan tersebut mencakup berbagai langkah strategis, seperti

peningkatan sistem pengelolaan limbah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah plastik.

Jika ditinjau dari waktu penerbitannya, kebijakan nasional Vietnam telah disusun sebelum ASEAN mengadopsi *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris 2021–2025*. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen Vietnam dalam menangani permasalahan *marine debris* tidak sepenuhnya muncul sebagai akibat dari keberadaan RAP ASEAN, melainkan merupakan bagian dari upaya nasional yang telah direncanakan sebelumnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan nasional dan kebijakan regional ASEAN berkembang secara paralel dalam merespons ancaman pencemaran sampah plastik laut.

Meskipun demikian, ASEAN RAP tetap memberikan kontribusi penting bagi Vietnam melalui penyediaan kerangka kerja regional yang dapat mendukung implementasi kebijakan nasional. Melalui berbagai program kerja sama yang difasilitasi ASEAN, Vietnam memperoleh kesempatan untuk memperkuat koordinasi dengan negara-negara anggota lainnya, bertukar pengalaman terkait pengelolaan limbah plastik, serta mengakses berbagai bentuk dukungan teknis dan peningkatan kapasitas yang diperlukan dalam implementasi kebijakan lingkungan.

Dalam perspektif Clive Archer, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ASEAN berfungsi sebagai instrumen yang mendukung dan memperkuat kebijakan nasional negara anggota, bukan sebagai aktor yang secara

langsung menentukan arah kebijakan domestik. ASEAN menyediakan mekanisme koordinasi dan pedoman regional, sementara implementasi kebijakan tetap berada di bawah kewenangan masing-masing negara anggota. Dengan demikian, hubungan antara ASEAN RAP dan kebijakan Vietnam lebih mencerminkan proses harmonisasi kebijakan dibandingkan hubungan yang bersifat instruktif atau mengikat.

Tantangan Implementasi ASEAN Regional Action Plan dalam Penanganan Marine Debris

Meskipun ASEAN telah mengembangkan berbagai kerangka kerja dan kebijakan regional untuk menangani permasalahan *marine debris*, implementasi ASEAN *Regional Action Plan* (RAP) 2021–2025 masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut muncul karena karakteristik ASEAN yang terdiri atas negara-negara dengan tingkat pembangunan, kapasitas kelembagaan, serta prioritas nasional yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan penanganan sampah plastik laut di kawasan ASEAN tidak berlangsung secara seragam.

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kapasitas antarnegara anggota dalam mengelola sampah plastik. Negara-negara seperti Singapura telah memiliki infrastruktur pengelolaan limbah yang relatif maju dan didukung oleh teknologi modern, sementara beberapa negara anggota lainnya masih menghadapi keterbatasan fasilitas pengolahan sampah, sistem daur ulang, serta sumber daya keuangan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kemampuan setiap

negara dalam mengimplementasikan berbagai target yang terdapat dalam ASEAN RAP menjadi berbeda-beda.

Selain perbedaan kapasitas, tantangan lain yang dihadapi ASEAN adalah keterbatasan mekanisme pengawasan terhadap implementasi kebijakan regional. ASEAN menganut prinsip *non-interference* yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggota. Akibatnya, ASEAN tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau memaksa negara anggota dalam melaksanakan komitmen yang telah disepakati. Pelaksanaan berbagai program yang terdapat dalam RAP pada akhirnya sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) dan komitmen masing-masing pemerintah nasional.

Dalam perspektif Clive Archer, kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan organisasi internasional dalam menjalankan fungsi sebagai instrumen kebijakan. Meskipun ASEAN mampu menyediakan pedoman dan kerangka kerja regional melalui ASEAN RAP, efektivitas implementasinya tetap ditentukan oleh respons negara-negara anggota sebagai aktor utama. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan regional tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga pada tingkat komitmen negara anggota dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan tingginya tingkat konsumsi plastik sekali pakai di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah plastik terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun beberapa negara telah menerapkan

kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha masih menjadi tantangan tersendiri. Di banyak wilayah, khususnya daerah pesisir dan pedesaan, penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi pilihan utama karena faktor harga dan kemudahan akses.

Di samping itu, keterbatasan pendanaan dan teknologi juga menjadi hambatan dalam upaya pengelolaan sampah plastik yang lebih berkelanjutan. Pengembangan fasilitas daur ulang modern, sistem pengolahan limbah terpadu, serta teknologi pengurangan sampah membutuhkan investasi yang besar. Tidak seluruh negara anggota ASEAN memiliki kemampuan yang sama untuk menyediakan sumber daya tersebut, sehingga pelaksanaan berbagai program yang direkomendasikan dalam RAP sering kali menghadapi kendala pada tahap implementasi.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan ASEAN *Regional Action Plan* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kerangka kebijakan regional, tetapi juga oleh kemampuan negara-negara anggota dalam mengimplementasikan komitmen yang telah disepakati. Oleh karena itu, penguatan koordinasi regional, peningkatan kapasitas nasional, serta dukungan pendanaan dan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas upaya penanganan *marine debris* di kawasan ASEAN.

SIMPULAN

Permasalahan *marine debris* merupakan salah satu tantangan lingkungan lintas batas yang memerlukan kerja sama regional dalam penanganannya. Sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, ASEAN telah berupaya merespons permasalahan tersebut melalui berbagai inisiatif, seperti *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region*, *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*, serta *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021–2025)*. Kehadiran berbagai instrumen tersebut menunjukkan komitmen ASEAN dalam memperkuat koordinasi dan kerja sama kawasan dalam mengurangi pencemaran sampah plastik laut.

Berdasarkan perspektif Clive Archer, penelitian ini menemukan bahwa ASEAN menjalankan fungsi sebagai arena dan instrumen dalam penanganan *marine debris*. Sebagai arena, ASEAN menyediakan ruang bagi negara-negara anggota untuk melakukan koordinasi, pertukaran informasi, dan penyusunan agenda bersama terkait pengelolaan sampah plastik laut. Sementara itu, sebagai instrumen, ASEAN berperan melalui ASEAN Regional Action Plan yang menjadi pedoman regional dalam mendukung implementasi kebijakan penanganan *marine debris* di negara-negara anggota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar negara anggota yang menjadi fokus penelitian, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam, telah memiliki kebijakan nasional terkait penanganan sampah plastik laut sebelum diterbitkannya ASEAN Regional Action Plan tahun 2021. Temuan ini menunjukkan bahwa

ASEAN bukan merupakan faktor utama yang mendorong lahirnya kebijakan nasional terkait *marine debris* di negara-negara tersebut. Sebaliknya, peran ASEAN lebih terlihat dalam upaya mengoordinasikan, memperkuat, dan menyelaraskan berbagai kebijakan nasional yang telah berkembang sebelumnya ke dalam kerangka kerja sama regional yang lebih terintegrasi.

Meskipun demikian, implementasi ASEAN *Regional Action Plan* masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan kapasitas antarnegara anggota, keterbatasan pendanaan dan teknologi, tingginya konsumsi plastik sekali pakai, serta tidak adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang mengikat dalam sistem kerja sama ASEAN. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas masing-masing negara anggota.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi utama ASEAN dalam penanganan *marine debris* tidak terletak pada pembentukan kebijakan nasional baru, melainkan pada perannya sebagai organisasi regional yang memfasilitasi koordinasi, harmonisasi kebijakan, dan penguatan kerja sama antarnegara anggota dalam menghadapi permasalahan sampah plastik laut di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, D. (2019). Ta: Pengaruh Keberadaan Struktur Pantai Pada Pergerakan Dan Distribusi Sampah Pesisir Di Perairan Serang (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional). <https://eprints.itenas.ac.id/1330/> 443
- AntaraNews. (2021). Sepanjang 2018-2020, kebocoran sampah ke laut turun 15 persen. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/2584273/sepanjang-2018-2020-kebocoran-sampah-ke-laut-turun-15-persen>
- Ar'bah, F. F. (2023). Upaya ASEAN Framework of Action on Marine Debris Dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut Kawasan ASEAN (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN). <http://repository.unpas.ac.id/66268/>
- Archer, C. (2001). *International Organizations* (3rd ed.). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203469556>
- ASEAN Secretariat. (2019). Bangkok Declaration on Combating Marine Debris. Retrieved from <https://asean.org/bangkok-declaration-on-combating-marine-debris-in-asean-region/>
- ASEAN Secretariat. (2021). ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021-2025). Retrieved from <https://asean.org/book/asean-regional-action-plan-for-combating-marine-debris-in-the-asean-member-states-2021-2025-2/>
- Fadilah, E. M., Dermawan, W., & Sudirman, A. (2022). Kompleks Keamanan Lingkungan Regional Kawasan Asean Dalam Menghadapi Ancaman Polusi Sampah Laut. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(3), 5575-5588. <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/1917>
- JAIF. (2022). Strengthening Capacity for Marine Debris Reduction in ASEAN Region through Formulation of National Action Plans for ASEAN Member States and Integrated Land-to-Sea Policy Approach (Phase 2). Retrieved from <https://jaif.asean.org/en/support/project-brief/strengthening-capacity-for-marine-debris-reduction-in-asean-region-through-formulation-of-national-action-plans-for-asean-member-states-and-integrated-land-to-sea-policy-approach-phase-2/>
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., ... & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *science*, 347(6223), 768-771. <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1260352?ijk ey=BXtBaPzbQagE&keytype=ref&siteid=sci>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2017). Rekap Sampah Laut Indonesia 2017. <https://ppkl.menlhk.go.id/webs/ite/filebox/274/180703160900REKAP%20SAMPAH%20LAUT%20INDONESIA%202017.pdf>

- KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). (2017). Komitmen Indonesia dalam Melawan Sampah Plastik di Laut. Retrieved from <https://share.google/ZNzp7fdg7Zx3BtLm4>
- Kompasiana.com. (2024). Perjuangan Melawan Polusi Sampah Laut di ASEAN: Tantangan Politik dan Kelembagaan. Kompasiana.com. Retrieved from https://www.kompasiana.com/bimate08/663c38fdde948f75b33bda62/perjuanganmelawan-polusi-sampah-laut-di-asean-tantangan-politik-dankelembagaan?page=all&utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded
- Ministry of Natural Resources and Environment Thailand. (2021). Thailand's Roadmap on Plastic Waste Management 2018. Retrieved from https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2021/10/pcdnw-2021-10-19_08-59-54_995414.pdf
- UN Environment Programme. (2017). Waste Management in ASEAN Countries: Summary Report. <https://wedocs.unep.org/items/ada46f04-fc67-4e3e-9b8e-070c3f8e2300>
- UNDP. (2020). Vietnam National Action Plan for Management of Marine Plastic Litter by 2030. Retrieved from <https://www.undp.org/vietnam/publications/national-action-plan-management-marine-plastic-litter-2030>
- World Bank. (2021). Better Managing Plastic Waste Could Combat Marine Pollution and Unlock Billions of Dollars for a Circular Economy: Southeast Asia Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/21/better-managing-plastic-waste-could-combat-marine-pollution-and-unlock-billions-of-dollars-for-a-circular-economy-southe>